BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan teknologi informasi (TI) dalam instansi pemerintahan sangatlah penting dalam menunjang efektivitas pelayanan publik sehingga sangat dibutuhkan pengetahuan serta sumberdaya yang efisien dan terlatih dibidangnya. Teknologi informasi (TI) saat ini menjadi teknologi yang banyak diterapkan oleh hampir seluruh organisasi (pemerintah, sektor industri, sektor swasta dan dunia pendidikan). TI dipercaya dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses-proses bisnis organisasi dalam mencapai tujuannya (Erdis Ekowansyah, Yulison H Chrisnanto, Puspita, 2017). Dalam pemerintahan penerapan teknologi informasi dan transaksi elektronik diatur dalam undang – undang, maka dari itu penggunaan teknologi informasi dalam instansi dipandang perlu dilakukan analisa tingkat kapabilitas untuk *assessment* atau tinjauan diri dalam mengetahui kondisi saat ini teknologi informasi dan organisasi guna mengetahui sejauh mana manfaat dan keberlangsungan dari penggunaan teknologi informasi dalam instansi pemerintahan.

Pemanfaatan teknologi informasi di sebuah lembaga pemerintahan secara teori diyakini memberikan kemudahan dan efisiensi dalam kaitannya dengan sistem pelayanan publik yang dalam penerapannya memerlukan tata kelola yang baik. Penggunaan sistem informasi pada instansi pemerintahan khususnya juga mempunyai peran yang cukup penting untuk dapat menghasilkan laporan

keuangan yang berkualitas demi terciptanya akuntabilitas. Sejalan dengan harapan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*, pemerintah berusaha mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan cara membangun teknologi informasi di bidang keuangan atau akuntansi dalam kaitannya pengelolaan keuangan daerah yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Pemerintah Kota Denpasar adalah salah satu instansi pemerintahan yang telah menerapkan SIPKD sejak pertengahan tahun 2010 dengan tahap penyesuaian yang sebelumnya sudah lebih dahulu menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Untuk keseragaman pengelolaan keuangan daerah maka SIMDA digantikan menjadi SIPKD. Setelah tahap penyesuaian penerapan SIPKD pada Pemerintah Kota Denpasar baru digunakan pada awal bulan Januari 2011 dan diterapkan oleh 34 Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD di Pemerintah Kota Denpasar. Pengolahan data keuangan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Denpasar diharapkan akan berjalan efektif apabila mempertimbangkan elemen-elemen penting dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan daerah seperti keamanan data, kecepatan dan ketepatan waktu, ketelitian, variasi laporan/*output* dan relevansi sehingga kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan opini BPK pada tanggal 25 Mei 2012 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar tahun 2011 mendapat opini Wajar Dalam Pengecualian (WDP) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 06.A/BPK.DPS/05/2012. Selanjutnya opini BPK pada

tanggal 30 Mei 2013 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar tahun 2012 mengalami peningkatan opini yaitu dari opini Wajar Dalam Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai LHP Nomor 04.A/LHP/ XIX.DPS/05/2013. Opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan karena menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, tidak terdapat kesalahan yang material, dan sesuai standar (Atyanta, 2011). Hal ini menjadi suatu kemajuan akan kinerja instansi di Pemerintah Kota Denpasar karena menunjukkan bahwa dalam penyajian Laporan Keuangan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Perundang-undangan yang berlaku serta disajikan secara andal dan tepat waktu (Ayu Ratna Dewi, P. & Sri Harta Mimba, 2014). Pemerintah Kota Denpasar memiliki 36 OPD dan 10 Bagian dari Sekretariat Daerah. Masing-masing OPD memiliki 1 Operator SIPKD yang bertugas untuk menginput data laporan keuangan ke SIPKD. Permasalahan teridentifikasi yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kota Denpasar mengacu pada belum terwujudnya tata kelola teknologi informasi yang benar.

Permasalahan internal Instansi Pemerintah Kota Denpasar inilah yang menjadi hal penting dilakukan penelitian yakni bagaimana melakukan penilaian tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi SIPKD. Dalam melaksanakan penelitian ini adalah menggunakan kerangka kerja *Control Objective for Information and Related Technology* 5 yang selanjutnya disingkat COBIT 5, dalam melaksanakan penilaian tingkat kapabilitas tata kelola SIPKD dan menghasilkan nilai tingkat kapabilitas tata kelola SIPKD saat ini *(Current capability level)* dan penilaian tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi

yang diharapkan (*expected capability level),* sehingga menghasilkan rekomendasi perbaikan tata kelola SIPKD yang baik.

Mengamati kondisi tersebut perlunya Evaluasi tata kelola SIPKD pada Pemerintah Kota Denpasar yang bertujuan demi terwujudnya laporan keuangan yang tercetak dengan SIPKD tepat waktu dan benar. Tata kelola SIPKD dipandang perlu untuk dikaji lebih mendalam dengan melakukan evaluasi tata kelola. Evaluasi tata kelola diperlukan untuk mencari tahu bagaimana pelaksanaan tata kelola, bagaimana tingkat kapabilitas tata kelola yang telah dilakukan, dan masalah-masalah apa yang dihadapi, sehingga dapat diusahakan jalan keluar dan rekomendasi yang tepat untuk peningkatan dan pengembangan. Cara penelitian evaluasi yang dilakukan berdasarkan kerangka kerja COBIT 5, yang dimodifikasi disesuaikan dengan kondisi di tempat penelitian (Lanang, Raditya, Sinaga, & Wisnubhadra, 2015). Modifikasi yang dilakukan yaitu mengukur beberapa aktifitas kegiatan yang diturunkan dari beberapa proses pada COBIT 5. Hasil dari tingkat kapabilitas yang didapatkan akan menjadi acuan rekomendasi perbaikan tata kelola teknologi informasi pada pemerintah Kota Denpasar.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang ada di Pemerintah Kota Denpasar khususnya pada SIPKD sebagai berikut:

a. Belum pernah diadakan evaluasi terhadap tata kelola sistem informasi untuk mengetahui kondisi tata kelola sistem informasi saat ini, dan

kondisi tata kelola sistem informasi yang diharapkan guna peningkatan kinjerja SIPKD.

b. Belum adanya rujukan *best practice* tata kelola sistem informasi, yang mempermudah pengguna dalam mengatasi masalah yang ada pada sistem informasi.

c. Adanya pembaharuan Sumber Daya Manusia di Pemerintah Kota Denpasar yang menyebabkan pegawai yang sudah fasih mengoperasikan dan mengelola sistem informasi dan digantikan dengan pegawai yang belum fasih mengoperasikan maupun mengelola sistem informasi tersebut, sehingga harus menyesuaikan kembali saat mengoperasikan dan mengelola sistem informasi.

1.3 Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan evaluasi tata kelola sistem informasi SIPKD dilakukan di Pemerintah Kota Denpasar.
b. Kegiatan evaluasi tata kelola sistem informasi fokus pada aktifitas penyusunan laporan berbasis akrual dengan SIPKD yang dilakukan oleh operator dan administrator SIPKD pada masing-masing OPD yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2013.
c. Menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mengevaluasi tata kelola sistem informasi, dengan menentukan tingkat kapabilitas saat ini dan

menentukan target beserta rekomendasi perbaikan tata kelola SIPKD, berdasarkan hasil dari tahapan yang ada pada kerangka kerja COBIT 5.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kapabilitas saat ini terkait proses evaluasi tata kelola SIPKD dengan kerangka kerja COBIT 5 pada Pemerintah Kota Denpasar?
2. Bagaimana indikator tingkat kapabilitas yang diharapkan terkait proses evaluasi tata kelola SIPKD dengan kerangka kerja COBIT 5 pada Pemerintah Kota Denpasar?
3. Bagaimana kesenjangan tingkat kapabilitas antara kondisi saat ini dengan yang diharapkan terkait proses evaluasi tata kelola SIPKD dengan kerangka Kerja COBIT 5 pada Pemerintah Kota Denpasar?
4. Bagaimana rekomendasi perbaikan tata kelola teknologi informasi terkait proses evaluasi tata kelola SIPKD dengan kerangka COBIT 5 pada Pemerintah Kota Denpasar?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas secara umum tujuan penelitian sebagai berikut:

a. Mengetahui kondisi tingkat kapabilitas saat ini pada tata kelola SIPKD Pemerintah Kota Denpasar dengan kerangka kerja COBIT 5.
b. Mengetahui pengukuran tingkat kapabilitas yang diharapkan pada tata kelola SIPKD pada Pemerintah Kota Denpasar dengan kerangka kerja COBIT 5.
c. Mengetahui analisa kesenjangan yang terjadi antara tingkat kapabilitas saat ini dengan tingkat kapabilitas yang diharapkan, serta tata kelola SIPKD pada Pemerintah Kota Denpasar dengan kerangka kerja COBIT 5.
d. Menghasilkan rekomendasi terhadap tata kelola teknologi informasi menggunakan kerangka kerja COBIT 5 agar tata kelola informasi pada Pemerintah Kota Denpasar semakin baik, khususnya para operator dan administrator SIPKD dapat semakin memaksimalkan tata kelola SIPKD dan menyajikan laporan yang dicetak dengan SIPKD tepat waktu.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut:

a. Aspek Teoretis

Secara teoritis manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Dapat memberikan pemahaman mengenai analisis tata kelola SIPKD dengan kerangka kerja COBIT 5 pada SIPKD Pemerintah Kota Denpasar.

2. Sebagai informasi pendukung dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan tata kelola teknologi informasi menggunakan kerangka kerja COBIT 5.
3. Memberikan pemahaman dalam mencari tingkat kapabilitas saat ini, yang diharapkan, analisa kesenjangan, dan rekomendasi perbaikan tata kelola SIPKD pada Pemerintah Kota Denpasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan.

b. Aspek Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan tata kelola SIPKD lebih baik dengan kerangka kerja COBIT 5.
2. Mengetahui sejauh mana proses Tingkat Kapabilitas tata kelola SIPKD pada Pemerintah Kota Denpasar.
3. Menjadi referensi bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan dalam mengelola SIPKD mengingat bahwa SIPKD adalah Sistem yang diberikan dari Kemendagri.